



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

**LKIP**

**2021**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2021**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SIKKA**

*Alamat :*

**DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKA DAN DESA**

***Jalan El - Tari Telp/Fax (0382) 21105***

**MAUMERE**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
*Jalan El Tari Telp./ Fax. (0382) 21105*  
**MAUMERE**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan upaya dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan gambaran hasil kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sikka selama Tahun Anggaran 2021.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini kami sadari masih memiliki banyak kekurangan baik dalam sistematika maupun data yang disampaikan, untuk itu saran dan kritik membangun untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kami susun semoga bermanfaat bagi semua pelaku yang memerlukan,

Maumere, 22 Februari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Sikka,



**FITRINITA KRISTIANI, S. SOS, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP 19731028 199302 2 003



## *Ikhtisar Eksekutif*

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka sebagai Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*), sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Sikka dalam melayani/memenuhi kebutuhan serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerja.

LKIP Tahun 2021 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023 sebagai dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Sikka, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, DPMD menetapkan berbagai kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat membantu DPMD kepada hasil yang diinginkan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sikka.

Pada Tahun Anggaran 2021 Program dan Kegiatan DPMD meliputi 4 (empat) Program dan 8 (delapan) kegiatan serta 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan untuk Belanja Operasi.

Program tersebut mengacu kepada Peraturan Pengelolaan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah dan Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Capaian kinerja DPMD ditahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dimana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan sasaran Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,596 terhadap target 0,636 dengan selisih negatif sebesar 0,04 (tidak mencapai target) dengan persentase capaian kinerja 93,86% dengan rincian :

- a. Capaian Indeks Ketahanan Sosial sebesar 0,688 terhadap target 0,694 dengan selisih negatif sebesar 0,006 (tidak mencapai target) dengan persentase capaian kinerja 99,13%;



- b. Capaian Indeks Ketahanan Ekonomi sebesar 0,467 terhadap target 0,547 dengan selisih negatif sebesar 0,08 (tidak mencapai target) dengan persentase capaian kinerja 85,55%;
- c. Capaian Indeks Ketahanan Lingkungan sebesar 0,634 terhadap target 0,669 dengan selisih negatif sebesar 0,35 (tidak mencapai target) dengan persentase capaian kinerja 94,01%; berdasarkan Keputusan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan No. 398.4.2 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
- d. Capaian usulan masyarakat yang diakomodir sebesar 92,51% terhadap target 84,18% dengan selisih positif 8,33% (melampaui target) dengan persentase capaian kinerja 109,89%, berdasarkan sampel jumlah usulan kegiatan masyarakat yang diakomodir dalam APBDesa 2021 sesuai klasifikasi Desa/status Desa;
- e. Capaian Indeks profesional profesional ASN sebesar 91,11 terhadap target 40 dengan selisih positif 51,11 (melampaui target) dengan persentase 227,77%. Berdasarkan perhitungan Indeks profesionalitas ASN DPMD 2021;
- f. Capaian Indeks Sarana dan Prasarana sebesar 0,428 terhadap target 2,00 dengan selisih negatif 1,572 (tidak mencapai target) dengan persentase capaian kinerja 21,4%. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dimiliki DPMD tidak memadai, ini berdasarkan perhitungan Indeks Sarana dan Prasarana DPMD 2021.

Hasil perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021 sebesar 0,596 dapat digambarkan Kemajuan dan Kemandirian Desa sebagai berikut :

1. Jumlah Desa Mandiri Tahun 2021 0 Desa;
2. Jumlah Desa Maju tahun 2021 sebanyak 14 Desa kondisi ini mengalami kemajuan sebanyak 8 Desa (bertambah sebanyak 6 Desa);
3. Jumlah Desa Berkembang Tahun 2021 sebanyak 56 Desa kondisi ini mengalami kemajuan dimana tahun 2020 jumlah desa berkembang sebanyak 45 Desa (bertambah sebanyak 11 Desa);
4. Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2021 sebanyak 64 Desa kondisi ini mengalami kemajuan dimana Tahun 2020 jumlah desa tertinggal sebanyak 73 Desa (berkurang sebanyak 9 Desa);
5. Jumlah Desa Sangat Tertinggal Tahun 2021 sebanyak 13 Desa kondisi ini mengalami kemajuan dimana tahun 2020 jumlah desa sangat tertinggal sebanyak 21 Desa (berkurang sebanyak 8 Desa).



Anggaran Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.280.730.646,- (*Tiga milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah*). Realisasi Belanja Rp 2.887.809.530,- (*Dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah*) atau diperoleh persentase sebesar 88,02% . berarti pencapaian tingkat keberhasilan realisasi anggaran DPMD Kabupaten Sikka pada level baik.

Untuk permasalahan yang ada di DPMD selama tahun 2021 antara lain Perencanaan belum berbasis pada data IDM, masih rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan di Desa terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa, kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan mulai dari Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, Kurang optimalnya pendampingan oleh tenaga pendamping profesional terhadap penggunaan dana desa , terhadap BUMDesa yang sampai saat ini belum berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan PAD Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa dinilai belum efisien dan efektif sehingga berpengaruh terhadap laporan keuangan Desa. Sedangkan untuk solusinya antara lain Peningkatan Pendampingan dan pembinaan terhadap aparatur pemerintah Desa yang dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, sehingga masyarakat lebih memahami tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi yang sesuai dengan kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah desa dan pelaksanaan pembinaan secara berkesinambungan oleh pihak Kabupaten serta dianggarkanya pelatihan, bimbingan teknis/sosialisasi dan pembinaan secara stimultan bagi pengelola keuangan desa dapat memahami cara pembuatan dan penyajian pelaporan keuangan desa dengan baik dan benar.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 ini dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan sebagai langkah perbaikan dalam meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

Maumere, 22 Februari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Sikka,

  
**FITRINITA KRISTIANI, S.Sos, M.Si**  
Pemula Utama Muda  
NIP 19731028 199302 2 003



## DAFTAR ISI

<b><i>Kata Pengantar</i></b> .....	i
<b><i>Ringkasan Eksekutif</i></b> .....	ii
<b><i>Daftar Isi</i></b> .....	v
<b>BAB I – PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Gambaran Umum .....	1
B. Isu Strategis .....	4
C. Dasar Hukum .....	4
D. Sistematika Penyajian .....	5
<b>BAB II – PERENCANAAN KINERJA</b> .....	7
A. Renstra Perubahan .....	7
B. IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dea .....	9
C. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarat dan Desa .....	11
<b>BAB III – AKUNTABIITAS KINEJA</b> .....	13
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	14
B. Realisasi Anggaran .....	45
<b>Bab IV - PENUTUP</b> .....	49
A. Kesimpulan .....	49
B. Langkah kedepan .....	51
<i>Lampiran – lampiran :</i>	





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

#### **1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok, Fungsi DPMD**

##### **a. Struktur Organisasi DPMD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 38 tahun 2016 susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sikka terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi :
  - a) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b) Sub Bagian Kepegawian, Keuangan dan Aset;
3. Bidang Pemerintahan Desa
  - a. Seksi Penataan Desa dan Pengembangan Aparatur Desa;
  - b) Seksi Kelembagaan dan Kerjas Sama Desa;
  - c) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa;
4. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa :
  - a) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - b) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa;
  - c) Seksi Produk Hukum Desa;
5. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat:
  - a) Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - c) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial Desa;







## **b. Tugas Pokok dan Fungsi DPMD**

- Tugas DPMD :

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

- Fungsi DPMD :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sumber daya Aparatur perangkat daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabuapten Sikka tahun 2021 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Tidak Tetap) sebanyak 35 pewartu, hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel 2.1**  
**Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020**

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Pegawai Negeri Sipil		
	- Golongan IV	3	
	- Golongan III	17	
	- Golongan II	7	
	- Golongan I	1	
2.	- Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Kontrak Daerah)	7	
	<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	

### **B. Isu Strategis**

Dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sikka didasarkan isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka sehingga melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isi-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka diantaranya :

1. Masih tingginya persentase desa tertinggal.
2. Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik.

### **C. Dasar Hukum**

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka tahun 2021. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaksanaan Penyusunan penyusunan LKIP DPMD Kabupaten Sikka Tahun 2021 memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP, yaitu :



1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 216 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
7. Peraturan Bupati Sikka Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### **D. Sistematika Penyajian**

Mekanisme penyajian laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini mengacu pada Sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I - Pendahuluan**

Menelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusunan LKIP dan sistem penyajian LKIP.

##### **Bab II - Perencanaan Kinerja**

Menjelaskan muatan Renstra 2018 – 2023 (Renstraa hasil revisi) tujuan, sasaran, indikator dan target selama lima tahun, lalu penjelasan IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.



### **Bab III - Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV - Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dari laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021, permasalahan dan kendala yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung.

#### A. Rencana Strategis Setelah Perubahan

##### 1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Sikka yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka tahun 2018-2023 adalah:

***"TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU  
SIKKA BAHAGIA 2023".***

Untuk mencapai visi ditetapkan misi sebagai upaya untuk memperjelas arah atau langkah dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Misi harus mengacu pada masalah pokok daerah. Misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

##### 2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi sebagai hasil akhir akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun.

Adapun tujuan jangka menengah yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Berkurangnya Desa Tertinggal
2. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik.



### **3. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yakni sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah secara terukur baik secara kualitatif dan kuantitatif, dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah adalah :

1. Meningkatnya pemenuhan akses ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan;
2. Persentase usulan masyarakat desa yang diakomodir;
3. Meningkatnya profesionalitas ASN
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.

### **4. Strategi dan Arah Kebijakan**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan perubahan secara mendasar, terencana dan terukur. Upaya pencapaian tersebut dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan.

#### **1. Strategi**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategi Jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di atas, ditetapkan strategi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
- 3) Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) pada DPMD Kabupaten Sikka;
- 4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja pelayanan publik pada DPMD Kabupaten Sikka;



## 2) Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan suatu pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Bertolak dari strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka arah kebijakan yang dibuat adalah :

- 1) Optimalisasi pendampingan di wilayah;
- 2) Koordinasi, sinkronisasi, integrasi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi perencanaan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
- 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- 3) Peningkatan ketrampilan dasar, sosial dan mental ASN
- 4) Peningkatan peralatan/perlengkapan perabot, interior dan tata ruang kantor;

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka program-program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penataan Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

## B. IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mengukur sejauh mana DPMD telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, maka pada masing-masing tujuan strategis dimaksud telah ditetapkan indikator kinerja utama rencana strategis dengan Tim SAKIP dan menyepakati Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sikka sebagai berikut :





**Tabel 2.1**

**Tujuan, Sasaran Indikator Utama Rencana Strategis DPMD 2018 - 2023**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
	Tujuan : Berkurangnya Desa Tertinggal	Indeks Desa membangun (IDM)
1.	Meningkatnya pemenuhan akses Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Lingkungan	Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Indeks Ketahanan IKL)
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir

Dari indikator kinerja utama tersebut diatas, dituangkan dalam target kinerja 5 (lima) tahunan yang dimuat dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Indikator Kinerja dan Target Kinerja selama Lima Tahun**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	satuan	Kondisi Awal 2018	Target setiap tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya pemenuhan akses Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Lingkungan	Indeks Desa membangun (IDM)	Indeks	0.560	0.565	0.606	0.636	0.655	0.695
		Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Indeks	0.617	0.550	0.664	0.694	0.724	0.754
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Indeks	0.432	0.434	0.507	0.547	0.587	0.627
		Indeks Ketahanan IKL)	Indeks	0.630	0.611	0.649	0.669	0.689	0.709
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir	Peren	78.18	80.13	82.13	84.18	86.28	88.34



3.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	20	30	40	50	70	70
4.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.00

### C. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berikut ini tabel Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi target pencapaian keberhasilan Dinas dalam melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sikka pada tahun 2021

Tabel : 2.3

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIKKA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pemenuhan akses ketahanan sosial katahanan ekonomi dan ketahanann lingkungan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0.636
		Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Indeks	0.694
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Indeks	0.547
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Indeks	0.669
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	$\frac{\text{Jumlah usulan masyarakat desa yang terakomodir dalam APB desa}}{\text{Jumlah usulan masyarakat dalam RKP desa}} \times 100\%$	%	84.18
3	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	40
4	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Pelayanan Publik	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan	Indeks	2.00



<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>SUMBER DANA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,885,980.728.00	APBD
2	Program Penataan Desa	139,389,950.00	APBD
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	153.840,000.00	APBD
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	98,533,700.00	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>3,280,730,646.00</b>	



## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi aman, DPMD Kabupaten Sikka selaku pengemban aman masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMD Kabupaten Sikka yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Perpresiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Kinerja Tahun 2021. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sikka.

Akuntabilitas Kinerja merupakan hasil pengukuran/capaian kinerja yang mengevaluasi dan menganalisis Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis penyebab keberhasilan/kegagalan (peningkatan/penurunan) kinerja serta alternative solusi yang dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis yang diambil oleh Dinas yang merupakan laporan tahun keketiga dari dokumen RPJMD/Renstra 2018 – 2023 pada masa jabatan Kepala Daerah periode 2018 – 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sikka tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja DPMD yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun 2021.



## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran.

Tahun Anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai, sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa keseluruhan sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik..

Kriteria pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya melebihi 50%(permenpan No. 54 tahun 2014) Pengukuran capain dan evaluasi kinerja kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

### **SASARAN 1** **Meningkatnya pemenuhan akses ketahan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan lingkungan**

**Tabel 3.1**  
**Kinerja Indeks Desa Membangu (IDM), Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks  
Ketahanan Ekonomi (IKE) , Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemenuhan akses ketahanan Sosial, Ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.636
		Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.694
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.547
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.669

Pencapaian Kinerja sasaran strategis untuk indikator kinerja Indeks Desa Membangu (IDM), Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) , Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) dapat disajikan sebagai berikut :

Keberhasilan program pembangunan, terutama bagi desa tidak bisa terlepas dari adanya perencanaan yang baik, tepat dan komprehensif yang berdasarkan pada potret kebutuhan riil masyarakat. Upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal tersebut tergambar dalam status kemajuan dan kemandirian Desa berdasarkan capaian Indeks Desa Membangun (IDM).



Indeks Desa Membangun merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumberdaya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021

**Tabel 3.1.1**

#### Perbandingan Target dengan Realisasi pada Tahun 2021

**Indikator Kinerja Indeks Desa Membangu (IDM), Indeks Ketahanan Sosial (IKS),  
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) , Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya pemenuhan akses ketahanan Sosial, Ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan	Indeks Desa Membangun	0.636	0.597	93.86
		Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.694	0.688	99.13
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.547	0.468	85.55
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.669	0.636	95.06

Dilihat dari Tabel 3.1.1 Capaian Indeks Desa Membangun berdasarkan Target Kinerja Renstra Dinas PMD Kabupaten Sikka Tahun 2021 sebagai berikut:

Capaian IDM Tahun 2021 sebesar 0,597 terhadap target 0,636 dengan selisih negatif sebesar 0,04 (tidak mencapai target) dengan persentase capaian kinerja 93,86% dengan rincian :

- a. Capaian Indeks Ketahanan Sosial sebesar 0,688 terhadap target 0,694 dengan selisih negatif sebesar 0,006 (tidak mencapai target) dengan persentase capaian kinerja 99,13%;



- b. Capaian Indeks Ketahanan Ekonomi sebesar 0,467 terhadap target 0,547 dengan selisih negatif sebesar 0,08 (tidak mencapai target) dengan persentase capaian kinerja 85,55%;
- c. Capaian Indeks Ketahanan Lingkungan sebesar 0,636 terhadap target 0,669 dengan selisih negatif sebesar 0,33 (tidak mencapai target) persentase capaian kinerja 95,06%.

Analisis pencapaian kinerja merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran pencapaian tingkat sasaran indikator Indikator Kinerja Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Tabel 3.1.1 menggambarkan tingkat pencapaian target yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

## **2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2021 dengan Tahun 2020**

Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang telah dicapai pada tahun 2021, dengan membandingkan antara kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Penyusunan LKIP tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban RPJMD tahun ketiga sehingga untuk tahun perbandingan menggunakan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.1.2**

**Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) , Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)**

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	2020			2021		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya pemenuhan akses ketahanan Sosial, Ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan	Indeks Desa Membangun	0.606	0.580	95.71	0.636	0.597	93.86
		Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.664	0.671	101.05	0.694	0.688	99.13
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.507	0.450	88.76	0.547	0.468	85.55
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.649	0.617	95.07	0.669	0.636	95.06

Dalam tabel diatas bila dibandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 sebagai berikut:

Capaian IDM Tahun 2020 sebesar 0.580 dan capaian IDM tahun 2021 sebesar 0,597 selisih positif sebesar 0,017 dengan persentase capaian kinerja 93,86% dengan rincian :

- a. Capaian Indeks Ketahanan Sosial tahun 2020 sebesar 0,671 dan tahun 2021 sebesar 0,688 dengan selisih positif sebesar 0,017 dengan persentase capaian kinerja 99,13%;
- b. Capaian Indeks Ketahanan Ekonomi tahun 2020 sebesar 0,450 dan tahun 2021 0,468 dengan selisih positif sebesar 0,018 dengan persentase capaian kinerja 85,55%;
- c. Capaian Indeks Ketahanan Lingkungan tahun 2020 sebesar 0,617 dan tahun 2021 sebesar 0,636 dengan selisih positif sebesar 0,021 persentase capaian kinerja 95,06%.

Hasil perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021 sebesar 0,596 dapat digambarkan Kemajuan dan Kemandirian Desa sebagai berikut :

1. Jumlah Desa Mandiri tahun 2021 0 Desa;
2. Jumlah Desa Maju Tahun 2021 sebanyak 14 Desa kondisi ini mengalami kemajuan sebanyak 8 Desa ( Bertambah sebanyak 6 Desa)
3. Jumlah Desa Berkembang Tahun 2021 sebanyak 56 Desa kondisi ini mengalami kemajuan dimana Tahun 2020 Jumlah desa Berkembang sebanyak 45Desa (Bertambah sebanyak 11 Desa).





4. Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2021 sebanyak 64 Desa kondisi ini mengalami kemajuan dimana Tahun 2020 Jumlah desa Tertinggal sebanyak 73 Desa (Berkurang sebanyak 9 Desa).
5. Jumlah Desa Sangat Tertinggal Tahun 2021 sebanyak 13 Desa kondisi ini mengalami kemajuan dimana Tahun 2020 Jumlah desa Sangat Tertinggal sebanyak 21 Desa (Berkurang sebanyak 8 Desa).

Tabel Status Kemajuan Desa

STATUS	2019 (Tahun Awal)	2020	2021
Maju	6	8	14
Berkembang	42	45	56
Tertinggal	73	73	64
Sangat tertinggal	26	21	13

*Tabel Peningkatan Jumlah Status Kemajuan Desa*

STATUS	2020	2021
Maju	2	8
Berkembang	3	11
Tertinggal	0	(9)
Sangat tertinggal	(5)	(8)

Sumber data Keputusan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor : 398.4.2 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

### **3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target terakhir rencana strategis**

Pengukuran pencapaian tingkat sasaran indikator Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan



Tabel 2.2 menggambarkan tingkat pencapaian kinerja dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat di dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

**Tabel 3.1.3**

**Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah pada Indikator Desa Membangun (IDM), Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)**

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2020	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2021	REALISASI CAPAIAN S/D TAHUN 2021	TARGET JANG MENENGAH RPJMD 2023	HASIL CAPAIAN KINERJA (%)
1	Meningkatnya pemenuhan akses ketahanan Sosial, Ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan	Indeks Desa Membangun	0.580	0.597	0.597	0.695	85.89
		Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.671	0.688	0.688	0.754	91.24
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.450	0.468	0.468	0.627	74.64
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.649	0.636	0.636	0.709	89.70

**4. Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka menyusun Perjanjian Kinerja untuk mencapai keberhasilan kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Peningkatan strategi manajemen pengelolaan program dan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi peningkatan komitmen dilingkungan internal DPMD dan eksternal (Desa, Kecamatan se Kabupaten Sikka) menjadi salah satu pendorong pencapaian target capaian kinerja selain adanya dukungan dan partisipasi masyarakat juga adanya anggaran, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 3.1.4**

**Pendukung Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja pada Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)**

Dalam Perjanjian Kinerja DPMD memiliki indikator kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya pemenuhan akses ketahanan Sosial, Ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan	Indeks Desa Membangun	0.636	0.597	93.86
		Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.694	0.688	99.13
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.547	0.468	85.55
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.669	0.636	95.06

Perjanjian Kinerja DPMD didukung oleh Perjanjian Kinerja Eselon III pada DPMD yakni :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
<b>I.</b>	<b>Tercapainya Penataan Desa</b>	<b>Persentase capaian penataan desa</b>	<b>100%</b>	<b>91,62%</b>
1.	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Persiapan Terasilitasi menjadi Desa Definitif	34 Desa	34 Desa
<b>II.</b>	<b>Tercapainya Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase capaian administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>91,01%</b>
2.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase capaian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	100%	91,01%
<b>III.</b>	<b>Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Kelembagaan Adat dan Lembaga Hukum Adat</b>	<b>Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelembagaan Adat dan Lembaga Hukum Adat</b>	<b>100%</b>	<b>78,19%</b>
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Hukum Adat yang diberdayakan	1 Lembaga	1 Lembaga



yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat a Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
---	--	--	--	--

Perjanjian Kinerja Eselon III didukung oleh Perjanjian Kinerja Eselon IV pada DPMD yakni:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
<b>I.</b>	<b>Tercapainya penataan desa</b>	<b>Persentase Capapain penataan desa</b>	<b>100%</b>	<b>91,62%</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Jumlah Desa Persiapan Terfasilitasi menjadi Desa Definitif</b>	<b>34 Desa Persiapan</b>	<b>34 Desa Persiapan</b>
1)	<i>Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa</i>	<i>Jumlah Desa Persiapan Terfasilitasi menjadi Desa Definitif</i>	34 Desa Persiapan	34 Desa Persiapan
<b>II.</b>	<b>Tercapainya Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase capain Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>99,61%</b>
<b>1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase capaian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>99,61%</b>
1)	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	147 Desa	147 Desa
2)	<i>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa</i>	<i>Jumlah Produk Hukum Desa yang terfasilitasi dalam penyusunannya</i>	7 Produk Hukum Desa	7 Produk Hukum Desa
3)	<i>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</i>	<i>Jumlah Aparatur Desa dan BPD yang mengikuti peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD</i>	222 orang	222 orang



III.	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Kelembagaan Adat dan Lembaga Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelembagaan Adat dan Lembaga Hukum Adat yang dilaksanakan	100%	99,91%
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat a Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Hukum Adat yang diberdayakan	1 Lembaga	1 Lembaga
1)	<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	<i>Capaian peningkatan kapasitas kelembagaan BBGRM, PKK, Posyandu dan Dharma Wanita Kabupaten</i>	1 Lembaga	1 Lembaga
2)	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa</i>	<i>Jumlah desa yang terfasilitasi penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa</i>	8 Kasus	12 Kasus

### 5. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- a. Mengotimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Efisiensi sarana dan prasarana Kerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, laptop digunakan pada saat jam kerja.
- c. Efisiensi penggunaan alat tulis kantor digunakan sesuai kebutuhan.



- d. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara sesuai kebutuhan.

Meskipun kuantitas personil belum sesuai kebutuhan dan beban kerja, dukungan sumber daya berupa kemampuan personil yang ada dengan strategi membentuk tim kerja memberikan dorongan keberhasilan pencapaian target kinerja. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Desa melalui Bimtek baik pengelola keuangan desa penganggaran pemerintah desa bersumber dari APBDesa yang dilakukan DPMD juga sedikit banyak memberikan pengaruh yang cukup dalam keberhasilan pencapaian target kinerja.

## 6. Analisa Program / Kegiatan yang menuju keberhasilan atau kegagalan Pencapaian Kinerja

Dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023 prioritas Pembangunan DPMD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah pada Misi 1 “ BERKURANGNYA DESA TERINGGAL”

Dalam mendukung capaian indikator kinerja Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) dan Persentase Usulan Masyarakat Desa yang diakomodir, Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik DPMD merencanakan 4 (empat) Program, dan 8 Kegiatan serta 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %		SISA ANGGARAN
		Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3,280,730,646		2,887,809,530	100	88.02	392,921,116
2.13	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota</i>		2,885,980,728		2,547,801,690	100	88.28	338,179,038
2.13. 01. 2.01	<i>Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	7	15,157,800	7	15,107,800	100	99.67	50,000
2.13. 01. 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1)	7	15,157,800	7	15,107,800	100	99.67	50,000
2.13. 01. 2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		2,480,928,101		2,144,374,059	100	86.43	336,554,042
2.13. 01. 2.02 01	2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30	2,448,528,101	30	2,111,974,059	100	86.25	336,554,042
2.13. 01. 2.02 03	3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7	32,400,000	7	32,400,000	100	100.00	-



KODE	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %		SISA ANGGARAN
		Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13. 01. 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>185,479,700</b>		<b>185,206,800</b>	<b>100.00</b>	<b>99.85</b>	<b>272,900</b>
2.13. 01. 2.06 01	4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	12	3,900,100	12	3,894,500	100.00	99.86	5,600
2.13. 01. 2.06 02	5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49	45,103,400	49	44,973,400	100.00	99.71	130,000
2.13. 01. 2.06 04	6) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	540	23,280,000	513	23,143,500	95.00	99.41	136,500
2.13. 01. 2.06 05	7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15	40,000,200	15	40,000,000	100.00	100.00	200
2.13. 01. 2.06 06	8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1	840,000	1	840,000	100.00	100.00	-
2.13. 01. 2.06 09	9) Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	12	72,356,000	12	72,355,400	100.00	100.00	600
2.13. 01. 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>140,818,327</b>		<b>139,655,736</b>	<b>100.00</b>	<b>99.17</b>	<b>1,162,591</b>
2.13. 01. 2.08 01	10) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	69,138,200	510	68,478,352	100.00	99.05	659,848
2.13. 01. 2.08 02	11) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	25,341,327	12	25,001,900	100.00	98.66	339,427
2.13. 01. 2.08 04	12) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21	46,338,800	21	46,175,484	100.00	99.65	163,316
2.13. 01. 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>63,596,800</b>		<b>63,457,295</b>	<b>100.00</b>	<b>99.78</b>	<b>139,505</b>
2.13. 01. 2.09 01	13) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	44,130,600	5	44,072,557	100.00	99.87	58,043
2.13. 01. 2.09 02	14) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dina Operasional atau Lapangan	5	5,800,000	5	5,721,138	100.00	98.64	78,862
2.13. 01. 2.09 06	15) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	7,749,600	10	7,747,000	100.00	99.97	2,600
2.13. 01. 2.09 10	16) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2	5,916,600	2	5,916,600	100.00	100.00	-
2.13 02	<b>Program Penataan Desa</b>		<b>139,389,950</b>		<b>127,708,320</b>	<b>100.00</b>	<b>91.62</b>	<b>11,681,630</b>
2.13. 02. 2.01	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>		<b>139,389,950</b>		<b>127,708,320</b>	<b>100.00</b>	<b>91.62</b>	<b>11,681,630</b>
2.13. 02. 2.01 01	17) Pembentukan, Penhapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	34	139,389,950	34	127,708,320	100.00	91.62	11,681,630
2.13. 02. 2.09 02	19) Fasilitasi Tata Wilayah Desa	-	-	-	-	-	-	-
2.13 04	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>98,533,700</b>		<b>89,673,700</b>	<b>100.00</b>	<b>91.01</b>	<b>8,860,000</b>



KODE	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %		SISA ANGGARAN
		Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13. 04. 2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>98,533,700</b>		<b>89,673,700</b>	<b>100.00</b>	<b>91.01</b>	<b>8,860,000</b>
2.13. 024 2.01 01	20) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	147	70,928,700	147	70,818,700	100.00	99.84	110,000
2.13. 024 2.01 02	21) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	7	10,125,000	7	10,125,000	100.00	100.00	-
2.13. 024 2.01 03	22) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-	-	-	-	-	-	-
2.13. 024 2.01 05	23) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	222	17,480,000	222	8,730,000	100.00	49.94	8,750,000
2.13. 024 2.01 08	24) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Kerjasama antar Desa	-	-	-	-	-	-	-
2.13. 024 2.01 09	25) Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	-	-	-	-	-
2.13. 024 2.01 11	26) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	-	-	-	-	-	-	-
2.13 05	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>		<b>156,826,268</b>		<b>122,625,820</b>	<b>100.00</b>	<b>78.19</b>	<b>34,200,448</b>
2.13. 05. 2.01	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata Bergerak di Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaku Humum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>2</b>	<b>156,826,268</b>	<b>2</b>	<b>122,625,820</b>	<b>100.00</b>	<b>78.19</b>	<b>34,200,448</b>
2.13. 05 2.01 02	27) Fasilitasi Penata Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK Posyandu,,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	-	-	-	-
2.13. 024 2.01 03	28) Fasilitasi Penata Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT,RW,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	141,526,268	1	122,625,820	100	86.65	18,900,448
2.13. 05 2.01 08	29) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	8	15,300,000	12	-	100	0.00	15,300,000
	<b>TOTAL</b>		<b>3,280,730,646</b>		<b>2,887,809,530</b>	<b>100</b>	<b>88.02</b>	<b>392,921,116</b>

Capaian masing – masing program adalah sebagai berikut :





**Tabel 3.1.5**

**Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja pada Indikator Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)**

No.	Program/Kegiatan	Capain Kinerja		Ket
		Fisik	Keuangan	
1	Program Penataan Desa	100%	91,62%	
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	100%	91,01	
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100%	78,19%	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	88,28%	

Dari ke- 4 (empat ) program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung keberhasilan indikator Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) untuk realisasi fisik semua program mencapai 100%, sedangkan untuk realisasi keuangan ada satu program yang capaiannya kecil yaitu di Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yaitu sebesar 78,19 % . Adapun yang menjadi kendala tidak tercapainya indikator tersebut karena tidak terealisasinya anggaran pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa.



## SASARAN 2

### Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	Persentase usulan masyarakat desa yang diakomodir	84.18

Pencapaian Kinerja sasaran strategis untuk indikator kinerja Persentase usulan masyarakat desa yang diakomodir dapat disajikan sebagai berikut :

#### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021

**Tabel 3.2.1**

#### Perbandingan Target dengan Realisasi pada Tahun 2021

#### Indikator Kinerja Persentase usulan masyarakat desa yang diakomodir

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	Persentase usulan masyarakat desa yang diakomodir	84.18	92.51	109.89

Dalam tabel diatas realisasi capaian kinerja Untuk sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan target 84,18 realisasi 92,51 selisih positif sebesar 8,33 dengan tingkat pencapaian kinerja 109,89% melampaui capaian target berdasarkan sampel perhitungan usulan kegiatan masyarakat desa diakomodir dalam APBdesa tahun 2021 dan RKPDesa tahun 2021 sesuai klasifikasi Desa / status desa.

#### 2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2021 dengan Tahun 2020

Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Indeks Persentase Usulan Masyarakat desa yang diakomodir yang telah dicapai pada tahun 2021, dengan membandingkan antara kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Penyusunan LKIP tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban RPJMD tahun ketiga sehingga untuk tahun perbandingan menggunakan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.2.2**

**Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Indeks Persentase usulan masyarakat desa yang diakomodir**

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	2020			2021		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	Persentase usulan masyarakat desa yang diakomodir	82.13	93.31	113.61	84.18	92.51	109.89

Dalam tabel diatas perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 pada Indeks persentase usulan masyarakat desa yang diakomodir relisasi 92.51 dan capain kinerja 109,89% dan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020 pada Indeks persentase usulan masyarakat desa yang diakomodir relisasi 93.31 dan capain kinerja 113,61% mengalami penurunan/ negatif 0,8 dan capain kinerja mengalami penuruna sebesar 3,72% namun relisasi melampau target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan peningkatan upaya perbaikan status desa dan kesejahteraan masyarakat desa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun capaian kinerja belum sepenuhnya tercapai.

Realisasi capaian indikator Indeks Persentase usulan masyarakat desa yang diakomodir untuk tahun 2021 melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa sangat baik dilihat dari perhitungan sampel jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBDesa tahun 2021 dan RKPDesa tahun 2021 sesuai klasifikasi Desa / status desa. Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh berbagai faktor pendukung, selain sumber daya aparatur pemerintah desa yang semakin membaik melalui sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sikka juga didukung dengan semakin besarnya bantuan keuangan yang diterima desa baik yang besumber dari APBD yakni Alokasi Dana Pembangunan Desa (ADPD) maupun APBN yakni Bantuan Keuangan Dana Desa cukup memberikan dorongan yang signifikan dalam program pembangunan dan pengembangan desa.



### 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target terakhir rencana strategis

Pengukuran pencapaian tingkat sasaran indikator Persentase Usulan Masyarakat desa yang diakomodir didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan Tabel 3.2.3 menggambarkan tingkat pencapaian kinerja dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat di dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

**Tabel 3.2.3**

#### Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah pada Indikator Persentase Usulan Masyarakat desa yang diakomodir

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2019	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2021	REALISASI CAPAIAN S/D TAHUN 2021	TARGET JANG MENENGAH RPJMD 2023	HASIL CAPAIAN KINERJA (%)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	Persentase usulan masyarakat desa yang diakomodir	92.00	92.51	92.51	88.34	104.72

### 4. Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka menyusun Perjanjian Kinerja untuk mencapai keberhasilan target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Peningkatan koordinasi dan komitmen yang jelas dilingkungan internal DPMD dan eksternal (Desa, Kecamatan se Kabupaten Sikka) menjadi salah satu pendorong pencapain target capaian kinerja selain adanya dukungan dan partisipasi masyarakat juga adanya anggaran, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



**Tabel 3.2.4**

**Pendukung Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja pada Persentase Usulan Masyarakat desa yang diakomodir**

Dalam Perjanjian Kinerja DPMD memiliki indikator kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa	Persentase usulan masyarakat desa yang diakomodir	82.13	92.51	112.63

**5. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Selama tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- d. Mengotimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- e. Efisiensi sarana dan prasarana Kerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, laptop digunakan pada saat jam kerja.
- f. Efisiensi penggunaan alat tulis kantor digunakan sesuai kebutuhan.
- g. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara sesuai kebutuhan.

Meskipun kuantitas personil belum sesuai kebutuhan dan beban kerja, dukungan sumber daya berupa kemampuan personil yang ada dengan strategi membentuk tim kerja memberikan dorongan keberhasilan pencapaian target kinerja. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Desa melalui Bimtek baik pengelola keuangan desa penganggaran pemerintah desa bersumber dari APBDesa yang dilakukan DPMD juga sedikit banyak memberikan pengaruh yang cukup dalam keberhasilan pencapaian target kinerja.

**6. Analisa Program / Kegiatan yang menuju keberhasilan atau kegagalan Pencapaian Kinerja**

Dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023 prioritas Pembangunan DPMD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah pada Misi 1 dengan tujuan Pembangunan yaitu “ **BERKURANGNYA DESA TERINGGAL**”

Dalam mendukung capaian indikator kinerja Indeks Desa Membangun dan Persentase Usulan Masyarakat Desa yang diakomodir, merencanakan 4 (empat) Program dan 8 (delapan) Kegiatan serta 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan dengan perincian sebagai berikut :



**SASARAN 3**  
**Meningkatnya Profesionalitas ASN**

**Tabel 3.3**  
**Sasaran meningkatnya Profesionalitas ASN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	40

Untuk capaian kinerja sasaran ke-3 yakni meningkatnya profesionalitas ASN dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1**  
**Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	40

Pencapaian kinerja sasaran strategis untuk indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN dapat disajikan sebagai berikut :

**1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2021**

**Tabel 3.3.1**  
**Perbandingan Target dengan Realisasi pada Tahun 2021**  
**Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	40	91,11	227,77



Dalam tabel diatas realisasi capaian kinerja untuk Indeks Profesionalitas ASN realisasi 92,29 selisih positif 52,29 dari target 40 (empat puluh) melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 230,72%. Perolehan capaian indikator didapat dari perhitungan indeks profesionalitas ASN DPMD tahun 2021.

Analisis pencapaian kinerja merupakan tingkat capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kinerja kegiatan tabel 2.3. menggambarkan tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan DPMD sebelumnya.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2021 dengan Tahun 2020

Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN yang telah dicapai pada tahun 2021, dengan membandingkan antara kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Penyusunan LKIP tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban RPJMD tahun ketiga sehingga untuk tahun perbandingan menggunakan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.2**

### Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Indeks Indeks Profesionalitas ASN

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	2020			2021		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	30.00	92.29	307.63	40.00	91.11	227.77

## 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target terakhir rencana strategis

Pengukuran pencapaian tingkat sasaran indikator Indeks Profesionalitas ASN didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan Tabel 3.3.3 menggambarkan tingkat pencapaian kinerja dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat di dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.



**Tabel 3.3.3**

**Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah pada Indikator Profesionalitas ASN**

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2019	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2021	REALISASI CAPAIAN S/D TAHUN 2021	TARGET JANG MENENGAH RPJMD 2023	HASIL CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	11.05	92.29	91.11	70	130.15

**4. Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka menyusun Perjanjian Kinerja untuk mencapai keberhasilan target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Peningkatan koordinasi dan komitmen yang jelas dilingkungan internal DPMD dan eksternal (Desa, Kecamatan se Kabupaten Sikka) menjadi salah satu pendorong pencapaian target capaian kinerja selain adanya dukungan dan partisipasi masyarakat juga adanya anggaran, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.3.4**

**Pendukung Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja pada Indeks Profesionalitas ASN**

Dalam Perjanjian Kinerja DPMD memiliki indikator kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	40.00	91.11





Perjanjian Kinerja DPMD didukung oleh Perjanjian Kinerja Eselon III pada DPMD yakni :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Terwujudnya Profesionalitas Kerja Penunang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	88,02%
		Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99,67%
		Terwujudnya Peningkatan pelayanan administrasi umum kantor	100%	99,17%
		Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99,17%

Perjanjian Kinerja Eselon III didukung oleh Perjanjian Kinerja Eselon IV pada DPMD yakni:

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
I.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terwujudnya profesionalitas Kerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>88,02%</b>
1.	<b><i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>	<b>Dipenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>99,67%</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD</i>	<i>7 Dokumen</i>	<i>7 Dokumen</i>
2.	<b><i>Administrasi Keuangan Daerah</i></b>	<b><i>Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi keuangan Daerah</i></b>	<b>100%</b>	<b>85,43%</b>



2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	30 orang
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan	7 orang	7 orang
3.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian Peningkatan pelayanan administrasi umum kantor</b>	<b>100%</b>	<b>99,85%</b>
4.	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor	12 jenis	12 jenis
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yan disediakan	49 jenis	49 jenis
6	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	540 OM	513 OM
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	15 jenis
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majala yang disediakan	1 jenis	1 jenis
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi, evaluasi pendampingan dan tugas lainnya di dalam dan luar daerah	12 kali	12 kali
4.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terwujudnya Penyediaan jasa pelayanan publik yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>99,17%</b>
9	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat keluar yang dikirim pos kilat da ekspedisi Jumlah tenaga admiistrasi yang honorinya terbayar	500 surat 3 orang	510 surat 3 orang
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan
11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan honorinya	21 jenis 1 orang	21 jenis 1 orang



## 5. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- a. Mengotimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Efisiensi sarana dan prasarana Kerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, laptop digunakan pada saat jam kerja.
- c. Efisiensi penggunaan alat tulis kantor digunakan sesuai kebutuhan.
- d. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Meskipun kuantitas personil belum sesuai kebutuhan dan beban kerja, dukungan sumber daya berupa kemampuan personil yang ada dengan strategi membentuk tim kerja cukup memberikan dorongan keberhasilan pencapaian target kinerja. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Desa melalui bimtek baik pengelolaan keuangan desa dan penganggaran pemerintah desa bersumber dari APBDesa yang dilakukan DPMD juga sedikit banyak memberikan pengaruh yang cukup dalam keberhasilan pencapaian target kinerja.

## 6. Analisa Program / Kegiatan yang menuju keberhasilan atau kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam mendukung capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN pada DPMD merencanakan 1 (satu) Program serta 1 (satu) kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15,157,800</b>	<b>15,107,800</b>	<b>99,69</b>
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,157,800	15,107,800	99,69
		<b>Administrasi Keuangan Daerah</b>	<b>2,480,928,101</b>	<b>2,144,374,059</b>	<b>86,43</b>
		<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2,448,528,101	2,111,974,059	86,43



		<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	32,400,000	32,400,000	100
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>185,479,700</b>	<b>185,206,800</b>	<b>99,85</b>
		<i>Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor</i>	3,900,100	3,894,500	99,85
		<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	45,103,400	44,973,400	99,71
		<i>Penyediaan bahan Logistik Kantor</i>	32,280,000	32,141,500	99,57
		<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	40,000,200	40,000,000	99,99
		<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan</i>	840,000	840,000	100
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	72,396,000	72,355,400	99,94
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>140,818,327</b>	<b>139,655,736</b>	<b>99,17</b>
		Penyediaan Jasa Surat menyurat	69,138,200	68,478,352	99,04
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25,341,327	25,001,900	98,66
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46,338,800	46,175,484	99,64
	<b>Total Anggaran dan Belanja</b>		<b>2,822,383,928</b>	<b>2,484,344,395</b>	<b>88,02</b>

Capaian masing – masing program sebagai berikut :



**Tabel 3.3.5**  
**Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja pada Indikator kinerja**  
**Indeks Profesionalitas ASN**

No.	Program/Kegiatan	Capain Kinerja		Ket
		Fisik	Keuangan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	88,02%	

Dari program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung keberhasilan indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN jika dilihat dari realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan mencapai 88,02%.

**SASARAN 4**  
**Meningkatnya Kuntitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik**

**Tabel 4.1**  
**Sasaran Meningkatnya Kuntitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana**  
**Pelayanan Publik**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kuntitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik	2.00

Untuk capaian kinerja sasaran ke-4 yakni meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 4.4.1.1**  
**Indikator Kinerja Indeks Sarana dan Prasarana publik Pelayanan Publik**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kuntitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik	2.00



Pencapaian kinerja sasaran strategis untuk indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN dapat disajikan sebagai berikut :

### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2021

**Tabel 4.4.1.1**  
**Perbandingan Target dengan Realisasi pada Tahun 2021**

**Indikator Kinerja Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kuntitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik	2.00	0.428	21.40

Dalam tabel diatas realisasi capaian kinerja untuk Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik dengan target 2.00 point, realisasi 0.428 point dengan persentase 21,40% capaian kinerja sangat kurang tidak sesuai dengan targat yang ditetapkan. Hal ini disebabkan fasilitas sarana dan prasarana banyak belum memadai (tempat parkir, ruang tunggu, layanan pengaduan dan layanan konsultasi) dan sarana dan prasarana banyak yang rusak. Perolehan capaian indikator didapat dari perhitungan sarana dan prasarana pelayanan publik DPMD tahun 2021.

Analisis pencapaian kinerja merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kinerja kegiatan tabel 3.2.2 menggambarkan tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan DPMD sebelumnya.

### 2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2021 dengan Tahun 2020

Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik yang telah dicapai pada tahun 2021, dengan membandingkan antara kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Penyusunan LKIP tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban RPJMD tahun ketiga sehingga untuk tahun perbandingan menggunakan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 4.4.2**

**Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 pada Indikator Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik**

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	2020			2021		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik	1.50	0.143	9.53	2.00	0.428	21.40

**3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target terakhir rencana strategis**

Pengukuran pencapaian tingkat sasaran indikator Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan Tabel 3.1.3 menggambarkan tingkat pencapaian kinerja dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat di dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

**Tabel 4.4.3**

**Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah pada Indikator Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik**

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2019	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2021	REALISASI CAPAIAN S/D TAHUN 2021	TARGET JANG MENENGAH RPJMD 2023	HASIL CAPAIAN KINERJA (%)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik	0.143	0.428	0.428	3.00	14.27

**4. Analisa Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan



Desa Kabupaten Sikka menyusun Perjanjian Kinerja untuk mencapai keberhasilan target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Peningkatan koordinasi dan komitmen yang jelas dilingkungan internal DPMD dan eksternal (Desa, Kecamatan se Kabupaten Sikka) menjadi salah satu pendorong pencapaian target capaian kinerja selain adanya dukungan dan partisipasi masyarakat juga adanya anggaran, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.4.4**

**Pendukung Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja pada Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik**

Dalam Perjanjian Kinerja DPMD memiliki indikator kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik	2.00	0.428

Perjanjian Kinerja DPMD didukung oleh Perjanjian Kinerja Eselon III pada DPMD yakni :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi publik	100%	99,78%

Perjanjian Kinerja Eselon III didukung oleh Perjanjian Kinerja Eselon IV pada DPMD yakni:





No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
I.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>99,78%</b>
1.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan sarana dan prasarana kantor</b>	<b>100%</b>	<b>99,78%</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Terpeliharanya kendaraan dinas operasional</i>	<i>5 unit</i>	<i>5 unit</i>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah kendaraan Dinas yang dibayarkan pajaknya dan Jumlah Pengemudi yang dibayarkan honorinya</i>	<i>5 unit 1 orang</i>	<i>5 unit 1 orang</i>
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Perlatan dan Mesin lainnya yang terpelihara</i>	<i>10 unit</i>	<i>10 unit</i>
4.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah saran dan prasarana gedung/Kantor yang terpelihara</i>	<i>2 unit</i>	<i>2 unit</i>

## 5. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :

- a. Mengotimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Efisiensi sarana dan prasarana Kerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, laptop digunakan pada saat jam kerja.
- c. Efisiensi penggunaan alat tulis kantor digunakan sesuai kebutuhan.
- d. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara sesuai kebutuhan.

Meskipun kuantitas personil belum sesuai kebutuhan dan beban kerja , dukungan sumber daya berupa kemampuan personil yang ada dengan strategi membentuk tim



kerja cukup memberikan dorongan keberhasilan pencapaian target kinerja. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Desa melalui Bimtek pengelolaan keuangan desa dan penganggaran pemerintah desa bersumber dari APBDesa yang dilakukan DPMD juga sedikit banyak memberikan pengaruh yang cukup dalam keberhasilan pencapaian target kinerja.

## 6. Analisa Program / Kegiatan yang menuju keberhasilan atau kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam mendukung capaian indikator kinerja Indeks Sarana dan Prasarana pelayanan publik pada DPMD merencanakan 1 (satu) Program serta 1 (satu) kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>63,596,800</b>	<b>63,457,295</b>
		<i><b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b></i>	<b>63,596,800</b>	<b>63,457,295</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44,130,600	44,072,557
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5,800,000	5,721,138
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,749,600	7,747,000
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,916,600	5,916,600
	<b>Total Anggaran dan Belanja</b>		<b>63,596,800</b>	<b>63,457,295</b>

Capaian masing – masing program sebagai berikut :



**Tabel**

**Tabel 3.4.5**

**Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja pada Indikator kinerja  
Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik**

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Belanja	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>63,596,800</b>	<b>63,457,295</b>	<b>99,78</b>
		<i><b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b></i>	<b>63,596,800</b>	<b>63,457,295</b>	<b>99,78</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44,130,600	44,072,557	99,86
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5,800,000	5,721,138	98,64
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,749,600	7,747,000	99,96
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,916,600	5,916,600	100
	<b>Total Anggaran dan Belanja</b>		<b>63,596,800</b>	<b>63,457,295</b>	<b>99,78</b>



No.	Program/Kegiatan	Capain Kinerja		Ket
		Fisik	Keuangan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,78%	

Dari program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung keberhasilan indikator kinerja Indeks sarana dan prasarana pelayanan publik jika dilihat dari realisasi fisik untuk semua program mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan mencapai 99,78%.

## B. Realisasi Anggaran

Secara umum realisasi keuangan pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

### 1. Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) :

Kode Rek.	Uraian	Anggaran	Realisasi Belanja	% Realisasi
5	<b>BELANJA</b>	<b>3,280,730,646</b>	<b>2,897,809,530</b>	<b>88.02</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3,270,722,146</b>	<b>2,877,801,030</b>	<b>87.98</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2,483,928,101	2,144,374,059	86.32
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	786,794,045	733,427,971	93.21
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10,008,500</b>	<b>10,008,500</b>	<b>100</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,008,500	10,008,500	100
	<b>Total Anggaran dan Belanja</b>	<b>3,280,730,646</b>	<b>2,897,809,530</b>	<b>88.02</b>

Untuk total realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sikka pada Tahun Anggaran 2021 diperoleh persentase sebesar 88,02% Pencapaian tingkat keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sikka berada pada level baik.



## 2. Belanja Penunjang Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) :

Sedangkan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang menunjang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %		SISA ANGGARAN
		Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3,280,730,646		2,887,809,530	100	88.02	392,921,116
2.13	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota</i>		2,885,980,728		2,547,801,690	100	88.28	338,179,038
2.13. 01. 2.01	<i>Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	7	15,157,800	7	15,107,800	100	99.67	50,000
2.13. 01. 2.01 06	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	15,157,800	7	15,107,800	100	99.67	50,000
2.13. 01. 2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		2,480,928,101		2,144,374,059	100	86.43	336,554,042
2.13. 01. 2.02 01	2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30	2,448,528,101	30	2,111,974,059	100	86.25	336,554,042
2.13. 01. 2.02 03	3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7	32,400,000	7	32,400,000	100	100.00	-
2.13. 01. 2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		185,479,700		185,206,800	100.00	99.85	272,900
2.13. 01. 2.06 01	4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	12	3,900,100	12	3,894,500	100.00	99.86	5,600
2.13. 01. 2.06 02	5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49	45,103,400	49	44,973,400	100.00	99.71	130,000
2.13. 01. 2.06 04	6) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	540	23,280,000	513	23,143,500	95.00	99.41	136,500
2.13. 01. 2.06 05	7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15	40,000,200	15	40,000,000	100.00	100.00	200
2.13. 01. 2.06 06	8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1	840,000	1	840,000	100.00	100.00	-
2.13. 01. 2.06 09	9) Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	12	72,356,000	12	72,355,400	100.00	100.00	600
2.13. 01. 2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		140,818,327		139,655,736	100.00	99.17	1,162,591
2.13. 01. 2.08 01	10) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	69,138,200	510	68,478,352	100.00	99.05	659,848
2.13. 01. 2.08 02	11) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	25,341,327	12	25,001,900	100.00	98.66	339,427
2.13. 01. 2.08 04	12) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21	46,338,800	21	46,175,484	100.00	99.65	163,316



KODE	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %		SISA ANGGARAN
		Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13. 01. 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>63,596,800</b>		<b>63,457,295</b>	<b>100.00</b>	<b>99.78</b>	<b>139,505</b>
2.13. 01. 2.09 01	13) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	44,130,600	5	44,072,557	100.00	99.87	58,043
2.13. 01. 2.09 02	14) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dina Operasional atau Lapangan	5	5,800,000	5	5,721,138	100.00	98.64	78,862
2.13. 01. 2.09 06	15) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	7,749,600	10	7,747,000	100.00	99.97	2,600
2.13. 01. 2.09 10	16) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2	5,916,600	2	5,916,600	100.00	100.00	-
2.13 02	<b>Program Penataan Desa</b>		<b>139,389,950</b>		<b>127,708,320</b>	<b>100.00</b>	<b>91.62</b>	<b>11,681,630</b>
2.13. 02. 2.01	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>		<b>139,389,950</b>		<b>127,708,320</b>	<b>100.00</b>	<b>91.62</b>	<b>11,681,630</b>
2.13. 02. 2.01 01	17) Pembentukan, Penhapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	34	139,389,950	34	127,708,320	100.00	91.62	11,681,630
2.13. 02. 2.09 02	19) Fasilitasi Tata Wilayah Desa	-	-	-	-	-	-	-
2.13 04	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>98,533,700</b>		<b>89,673,700</b>	<b>100.00</b>	<b>91.01</b>	<b>8,860,000</b>
2.13. 04. 2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>98,533,700</b>		<b>89,673,700</b>	<b>100.00</b>	<b>91.01</b>	<b>8,860,000</b>
2.13. 024 2.01 01	20) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	147	70,928,700	147	70,818,700	100.00	99.84	110,000
2.13. 024 2.01 02	21) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	7	10,125,000	7	10,125,000	100.00	100.00	-
2.13. 024 2.01 03	22) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	-	-	-	-	-	-	-
2.13. 024 2.01 05	23) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	222	17,480,000	222	8,730,000	100.00	49.94	8,750,000
2.13. 024 2.01 08	24) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Kerjasama antar Desa	-	-	-	-	-	-	-
2.13. 024 2.01 09	25) Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	-	-	-	-	-
2.13. 024 2.01 11	26) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	-	-	-	-	-	-	-
2.13 05	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>		<b>156,826,268</b>		<b>122,625,820</b>	<b>100.00</b>	<b>78.19</b>	<b>34,200,448</b>



KODE	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN %		SISA ANGGARAN
		Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13. 05. 2.01	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata Bergerak di Bidang Pemberdayaan dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaku Humum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten Kota</i>	-	156,826,268	-	122,625,820	100.00	78.19	34,200,448
2.13. 05 2.01 02	27) Fasilitasi Penata Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	-	-	-	-
2.13. 024 2.01 03	28) Fasilitasi Penata Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT,RW,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	141,526,268	1	122,625,820	100	86.65	18,900,448
2.13. 05 2.01 08	29) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	8	15,300,000	8	-	100	0.00	15,300,000
<b>TOTAL</b>			<b>3,280,730,646</b>		<b>2,887,809,530</b>	<b>100</b>	<b>88.02</b>	<b>392,921,116</b>



## BAB IV

# PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sepanjang tahun 2021 ini beberapa keberhasilan maupun ketidakberhasilan telah dicapai oleh DPMD Kabupaten Sikka.

Beberapa keberhasilan yang dapat dicapai antara lain :

- Terlaksananya rapat koordinasi, konsultasi, Evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya di dalam dan luar daerah antara lain : Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 2020 dan percepatan perencanaan pembangunan dana desa 2021; Rapat koordinasi pemanduserasian arah pembangunan daerah dan berbasis IDM dan SDGs Desa, Refocusing Dana Desa dan Avokasi BUMDesa, Monitoring dan Evaluasi Dana Desa tahun 2021).
- Fasilitasi Asistensi dan Verifikasi RKPDesa tahun 2021;
- Telaksananya Sosialisasi Penerimaan Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2021;
- Terlaksananya kegiatan Monitoring Realisasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2021;
- terselesaikannya permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- Terlaksananya kegiatan Operasional PKK Kabupaten dan Operasional Dharma Wanita Kabupaten;
- Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa;
- Terbentuknya 4 (empat) Peraturan Bupati, 2 (dua ) Peraturan Bupati yang belum ditetapkan dan 1 (satu) Keputusan Bupati;
- Terlaksananya proses pembentukan 34 (tiga puluh empat ) desa Definitif;

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2021 adalah strategi manajemen DPMD dalam mengelaborasi peranserta masyarakat desa, LSM, Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan se Kabupaten Sikka, Tenaga pendamping profesional dan keseluruhan personil DPMD Kabupaten Sikka.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam usaha meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa dan meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan terlaksananya proses pembentukan Desa definitif antara lain :

- a Permasalahan Internal :





Secara internal permasalahan yang dihadapi adalah:

- 1) Pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai dengan kalender kerja, pergeseran tersebut diakibatkan karena Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dimana adanya perubahan kebijakan keuangan dalam rangka mencegah dan menanggulangi Covid-19;
- 2) SDM Aparatur DPMD yang kurang memadai dari sisi kuantitas; jumlah staf yang ada tidak sebanding dengan beban tugas, dari sisi kapasitas tidak memiliki staf dengan keahlian tertentu Antara lain akuntansi, hukum, teknik sipil untuk verifikasi desigen RAB, teknik komputer untuk pengolahan Profil Desa dan Aplikasi keuangan desa dan urusan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dana desa maupun urusan secretariat;
- 3) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang sangat minim yang menyebabkan kompetensi yang kurang maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 4) Sarana dan prasarana yang kurang menunjang dalam pelaksanaan tugas, Antara lain terbatasnya jumlah kendaraan roda dua, Aula Pertemuan yang tidak representative, meja kursi yang kurang, tidak mempunyai ruang arsip untuk Arsip-arsip Vital terkait SPJ Dana Desa dan dokumen-dokumen Perencanaan Desa.

a. Eksternal

Secara eksternal, hal-hal yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa Antara lain:

- 1) Kapasitas Sumber daya aparatur pemerintah desa yang kurang memadai sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan desa kurang optimal baik dari sisi administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi keuangan desa; berbagai data pendukung tidak terdata secara baik dan tidak akurat. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tidak sinkron dan pelaksanaan pembangunan di Desa tidak tepat waktu menyebabkan SILPA;
- 2) Perencanaan belum berbasis pada data IDM;
- 3) Masih rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan di desa terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa;
- 4) Kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Camat, sehingga masih banyak desa yang mengalami berbagai kesulitan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan terutama dalam bidang kelembagaan tentang tugas dan fungsi BPD dalam mitra pemerintah desa dalam penggunaan dana desa;



- 5) Kurang optimalnya pendampingan oleh tenaga pendamping professional terhadap penggunaan dana desa;
- 6) Orientasi dan arah pembangunan desa yang cenderung mengarah pembangunan fisik prasarana dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dirasakan masih kurang mendapat respon dari masyarakat;
- 7) Terdapat BUMDesa-BUMDesa yang sampai saat ini belum berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan PADesa;
- 8) Tidak adanya data Profil Desa/Kelurahan dan Data Dasar Keluarga yang mendukung perencanaan pembangunan desa;
- 9) Keterlambatan pengiriman laporan perkembangan pelaksanaan desa persiapan yang berdampak pada keterlambatan proses pengkajian tingkat evaluasi perkembangan desa;
- 10) Dana operasional Desa Persiapan yang kurang memadai menimbulkan hambatan dalam pendataan dan penyelesaian berbagai laporan penyelenggaraan Desa Persiapan.

## **B. Langkah Kedepan Solusi / upaya pemecahan**

### **a. Internal**

Tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan adalah Personil pelaksana kegiatan dari mulai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus :

- 1) Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;  
Konsistensi dan komitmen melaksanakan program dan kegiatan serta mengikuti dinamika kebijakan Nasional dan Daerah.
- 2) Memberikan motivasi dan optimalisasi SDM yang ada melalui peningktn kualitas pribadi secara otodidak;
- 3) Meningkatkan SDM melalui pembinaan teknis dan kerja sambil belajar;
- 4) Mengoptimalkan prasarana dan sarana yang ada.

### **b. Eksternal**

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan TAPD untuk maksiml memberikan Pendampingan dan pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa yang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar data pendukung secara baik dan akurat;
- 2) Melakukan proses perencanaan desa harus disesuaikan dengan basis data IDM;



- 3) Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan masyarakat melalui asistensi APBDesa, Sosialisasi dan mengoptimalkan Perencanaan Pembangunan oleh Camat terhadap Aparatur Desa dan BPD;
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan TAPD;
- 5) Melakukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi desa
- 6) Optimalisasi, koordinasi pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa oleh Camat, dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam penggunaan dana desa.
- 7) Optimalisasi koordinasi pendampingan bersama tenaga pendamping profesional terhadap penggunaan dana desa sesuai dengan tahap perencanaan.
- 8) Koordinasi dengan pihak Kecamatan agar memfasilitasi penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan desa persiapan di wilayahnya;
- 9) Koordinasi arah pembangunan desa agar tidak mengarah hanya pada pembangunan fisik prasarana tetapi juga memperhatikan pemberdayaan masyarakat.

Demikian, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 ini kami buat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Maumere, 22 Februari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Sikka,



**FITRINITA KRISTIANI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP 19731028 199302 2 003

